

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

<p><b>PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM</b></p>	<p><b>PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM</b></p>
<p><b>TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM</b></p>	<p><b>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM</b></p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p>
<p>Menimbang :</p>	<p>Menimbang :</p>
<p>a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan perlu didukung oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah;</p> <p>b. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperoleh melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Umum yang belum tercantum dan juga terdapat jenis yang dihapus dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.</p>

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015
Mengingat :	Mengingat :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</li> <li>7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;</li> <li>8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap</li> <li>2. Tetap</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);</li> <li>4. Tetap</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</li> <li>7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);</li> </ol>

<p>2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6).</p>	<p>8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11).</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>3. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>4. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.	Tetap
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.	Tetap
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.	Tetap
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.	Tetap
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.	Tetap
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.	Tetap
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.	Tetap
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi.	Tetap
12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.	Tetap
13. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.	Tetap

14. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.	Tetap
15. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tetap
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.	Tetap
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tetap
18. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
<b>BAB II</b> <b>JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI</b>	Tetap
Pasal 2	Tetap
Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang; dan c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.	Tetap
Pasal 3	Tetap
Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.	Tetap
<b>BAB III</b> <b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</b>	Tetap
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	Tetap
Pasal 4	Tetap
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap
Pasal 5	Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diubah, huruf c angka 3 dihapus, dan huruf c angka 6 diubah, serta ditambah ketentuan ayat (3) baru sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi setiap pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, yang jenisnya meliputi: 1. pelayanan rawat jalan;	(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi setiap pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) dan Rumah Sakit Khusus Paru Respira (RSKP Respira), yang jenisnya meliputi:

<p>2. pelayanan rawat darurat/unit gawat darurat;  3. pelayanan rawat inap sementara;  4. pelayanan Intensive Care Respiratori Unit;  5. pelayanan tindakan medik dan terapi;  6. pelayanan penunjang medik;  7. pelayanan rehabilitasi medik;  8. pelayanan konsultasi khusus;  9. pelayanan ambulance; dan  10. pelayanan rawat inap.</p> <p>b. Balai Laboratorium Kesehatan, yang jenisnya meliputi:  1. pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;  2. pelayanan pemeriksaan imunologi;  3. pelayanan pemeriksaan toksikologi;  4. pelayanan pemeriksaan kimia air;  5. pelayanan pemeriksaan hematologi;  6. pelayanan pemeriksaan kimia klinik; dan  7. pelayanan strain/media/reagen dan pemantapan mutu ekseternal (PME).</p> <p>c. Balai Pelatihan Kesehatan , yang jenisnya meliputi:  1. pelayanan rawat jalan;  2. pelayanan rawat inap/hari;  3. pelayanan rawat kunjungan rumah;  4. pelayanan tindak medik;  5. pelayanan pemeriksaan laboratorium;  6. pelayanan keur dokter; dan  7. pelayanan konsultasi medik.</p>	<p>1. pelayanan rawat jalan;  2. pelayanan rawat darurat/unit gawat darurat;  3. pelayanan rawat inap sementara;  4. pelayanan Intensive Care Respiratori Unit;  5. pelayanan tindakan medik dan terapi;  6. pelayanan penunjang medik;  7. pelayanan rehabilitasi medik;  8. pelayanan konsultasi khusus;  9. pelayanan ambulance; dan  10. pelayanan rawat inap.</p> <p>b. Balai Laboratorium Kesehatan, yang jenisnya meliputi:  1. pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;  2. pelayanan pemeriksaan imunologi;  3. pelayanan pemeriksaan toksikologi;  4. pelayanan pemeriksaan kimia air;  5. pelayanan pemeriksaan hematologi;  6. pelayanan pemeriksaan kimia klinik; dan  7. pelayanan strain/media/reagen dan pemantapan mutu eksternal (PME).</p> <p>c. Balai Pelatihan Kesehatan, yang jenisnya meliputi:  1. pelayanan rawat jalan;  2. pelayanan rawat inap/hari;  3. dihapus;  4. pelayanan tindak medik;  5. pelayanan pemeriksaan laboratorium;  6. pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan keur dokter;  7. pelayanan konsultasi medik; dan  8. pelayanan jasa rujukan ke RS.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pelayanan pendaftaran.</p>
Pasal 6	Tetap
Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	Tetap
Pasal 7	Tetap
Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan.	

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tetap
Pasal 8	Tetap
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa di setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Jumlah pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan tahunan dan analisa perkiraan potensi jumlah pengguna jasa setiap unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	Tetap
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal II
Pasal 9	Tetap
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa. (2) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. (3) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belanja operasi; b. belanja pemeliharaan; dan c. belanja modal.	Tetap
Pasal 10	Tetap
(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan pembagian antara biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pelayanan kesehatan. b. belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. c. belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan	Tetap

<p>langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.</p> <p>d. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.</p> <p>e. besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna Jasa.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
<p><b>BAB IV</b> <b>RETRIBUSI PELAYANAN JASA TERA/ TERA ULANG</b></p>	Tetap
<p>Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p>	Tetap
Pasal 11	Tetap
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap
Pasal 12	Tetap
<p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang adalah pelayanan jasa Tera/Tera Ulang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jenis pelayanan jasa Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;</p> <p>b. Kalibrasi ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya; dan</p> <p>c. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.</p>	Tetap
Pasal 13	Tetap
Subjek Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa tera/tera ulang.	Tetap
Pasal 14	Tetap
Wajib Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan jasa tera/tera ulang.	Tetap
<p>Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	Tetap
Pasal 15	Tetap

<p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa di setiap jenis pelayanan jasa tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p> <p>(2) Jumlah pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan tahunan dan analisa perkiraan potensi jumlah pengguna jasa setiap jenis pelayanan jasa tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p>Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	Tetap
<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p> <p>(2) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p>(3) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja operasi;</li> <li>b. belanja pemeliharaan; dan</li> <li>c. belanja modal.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>	Tetap
<p>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan pembagian antara biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dengan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).</p> <p>(2) Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pelayanan kesehatan.</li> <li>b. belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.</li> <li>c. belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.</li> <li>d. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional</li> </ol>	Tetap

<p>berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.</p> <p>e. besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna Jasa.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
<p><b>BAB V</b> <b>RETRIBUSI PELAYANAN JASA PENDIDIKAN</b></p>	Tetap
<p>Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p>	Tetap
Pasal 18	Tetap
Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap
Pasal 19	Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
<p>(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jasa pelayanan pelatihan kesehatan masyarakat di Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES);</li> <li>b. jasa latihan ketrampilan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP);</li> <li>c. jasa latihan pengukuran produktivitas di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP);</li> <li>d. jasa latihan dan pelayanan lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja;</li> <li>e. jasa pelayanan penelitian dan praktek kerja lapangan di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru; dan</li> <li>f. pelayanan penelitian dan praktek kerja lapangan.</li> </ol> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;</li> <li>b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;</li> <li>b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;</li> </ol>	<p>(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jasa pelayanan pelatihan kesehatan masyarakat di Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES);</li> <li>b. jasa latihan ketrampilan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP);</li> <li>c. jasa latihan pengukuran produktivitas di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP); dan</li> <li>d. jasa latihan dan pelayanan lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.</li> <li>e. Dihapus</li> <li>f. dihapus</li> </ol> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;</li> <li>b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD; dan</li> <li>c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD; dan</li> </ol>

c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
Pasal 20	Tetap
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.	Tetap
Pasal 21	Tetap
Wajib Retribusi Pelayanan Jasa Pendidikan meliputi orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan pendidikan.	Tetap
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tetap
Pasal 22	Tetap
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa di setiap jenis pelayanan jasa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Jumlah pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan tahunan dan analisa perkiraan potensi jumlah pengguna jasa setiap jenis pelayanan jasa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.	Tetap
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Tetap
Pasal 23	Tetap
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya pemberian jasa. (2) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. (3) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belanja operasi; b. belanja pemeliharaan; dan c. belanja modal.	Tetap
Pasal 24	Tetap
(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan pembagian antara biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dengan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). (2) Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana	Tetap

<p>dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pelayanan kesehatan.</p> <p>b. belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.</p> <p>c. belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.</p> <p>d. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.</p> <p>e. besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf d ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna Jasa.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
<b>BAB VI</b> <b>WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI</b>	Tetap
Pasal 25	Tetap
Wilayah pemungutan retribusi meliputi wilayah daerah dimana objek retribusi berada.	Tetap
<b>BAB VII</b> <b>PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN</b> <b>DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</b>	Tetap
Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran	Tetap
Pasal 26	Tetap
<p>(1) Retribusi dibayarkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.</p> <p>(3) Wajib retribusi mendapatkan SSRD setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p>	Tetap

(5) Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	
Bagian Kedua Tempat Pembayaran	Tetap
Pasal 27	Tetap
Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.	Tetap
Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran	Tetap
Pasal 28	Tetap
(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengangsur retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 29	Tetap
(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>BAB VIII</b> <b>PENAGIHAN RETRIBUSI</b>	Tetap
Pasal 30	Tetap
(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis. (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.	Tetap

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.	
BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF	Tetap
Pasal 31	Tetap
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Tetap
BAB X KEBERATAN	Tetap
Pasal 32	Tetap
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas besaran Retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRDLB, atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan: a. kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan b. secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDLB, atau dokumen lain diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.	Tetap
Pasal 33	Tetap
(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan. (2) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut	Tetap

dianggap dikabulkan.	
Pasal 34	Tetap
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.	Tetap
<b>BAB XI</b> <b>PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</b>	Tetap
Pasal 35	Tetap
(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi. (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>BAB XII</b> <b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI</b>	Tetap
Pasal 36	Tetap
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur. (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.	Tetap

<p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA</b></p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p>	Tetap
<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan surat teguran; atau</li> <li>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p>	Tetap
<p>(1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIV</b> <b>PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI</b></p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p>	Tetap

(1) Peninjauan tarif retribusi jasa umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>BAB XV PEMERIKSAAN</b>	Tetap
Pasal 40	Tetap
(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>BAB XVI INSENTIF PEMUNGUT</b>	Tetap
Pasal 41	Tetap
(1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar realisasi penerimaan retribusi. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
<b>BAB XVII PENYIDIKAN</b>	Tetap
Pasal 42	Tetap

Tetap

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<b>BAB XVIII KETENTUAN PIDANA</b>	Tetap
Pasal 43	Tetap
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 21, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Tetap
Pasal 44	Tetap
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) merupakan penerimaan negara	Tetap
<b>BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN</b>	Tetap
Pasal 45	Tetap
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.	Tetap
<b>BAB XX KETENTUAN PENUTUP</b>	Tetap
Pasal 46	Tetap
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 47	Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 DESEMBER 2011 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2015 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 6 DESEMBER 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ICHSANURI	Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ICHSANURI
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 11	LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 1